

## **KEPENTINGAN DAN BENTUK ARGUMENTASI PESAN KOMUNIKASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KOMISI IV DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2010**

Halomoan Harahap<sup>1</sup>, Sarwititi S. Agung<sup>2</sup>, Basita Ginting S<sup>2</sup>, Darwis S. Gani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, Jakarta

<sup>2</sup> Program Studi Komunikasi Pembangunan, IPB, Bogor

Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510

Halomoan.harahap@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*One function of the House of Representatives of Indonesia is to articulate and defend the interests of the people so that the government development programs to the people of Indonesia. This study to describe the interest in the message content and kind of argument used by the House of Representatives Commission IV during a hearing with the Ministry of Agriculture in 2010. This study uses a content analysis of documents during a hearing in 2010. The study found 66.1% messages that contain the public interest, 62.2% use factual arguments, and 45.5% using narrative evidence.*

**Keywords:** *the content of messages, arguments, hearings*

### **Abstrak**

Salah satu Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia adalah untuk menyuarakan kepentingan rakyat Indonesia. Melalui rapat dengar pendapat Dewan Perwakilan Rakyat menyuarakan kepentingan rakyat sehingga program pembangunan pemerintah berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia. Penelitian ini ingin mendeskripsikan muatan kepentingan dan bentuk argumentasi yang digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Komisi IV sewaktu dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi terhadap dokumen rapat dengar pendapat sepanjang tahun 2010. Hasil penelitian menemukan 66,1% pesan komunikasi mengandung kepentingan masyarakat, 62,2 % menggunakan argumen faktual dan 45,5% menggunakan bukti naratif.

**Kata kunci:** isi pesan, argumentasi, rapat dengar pendapat

### **Pendahuluan**

Sejak tahun 1997 Indonesia melakukan reformasi di bidang pemerintahan. Langkah reformasi merupakan sebuah upaya mengubah pendekatan pembangunan sentralistik menjadi desentralistik. Pembangunan desentralisasi merupakan langkah

penyusunan program pembangunan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat (*bottom-up*). Pendekatan *bottom up* dipandang lebih tepat dan telah banyak membawa hasil yang nyata di beberapa negara berkembang. (Ledwith 2007). Pendekatan pembangunan *bottom up* menyertakan ma-

syarakat untuk menyusun dan merumuskan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan hanya kebutuhan para perencana pembangunan atau pemerintah. Untuk mewujudkan pembangunan model *bottom up*, partisipasi masyarakat menjadi penting diaktualisasikan.

Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (*beneficiaries*) atau objek pembangunan belaka, tetapi sebagai subjek yang menentukan suksesnya pembangunan. Pembangunan idealnya mengedepankan kepentingan rakyat karena pemerintahan dibentuk untuk rakyat. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Pembangunan seharusnya mengedepankan prinsip “dari rakyat dan untuk rakyat”.

Dalam mengaktualisasikan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemerintah telah menyediakan mekanisme menampung aspirasi masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Anggota DPR dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka dalam sistem pemerintahan. Sebagai wakil rakyat, anggota DPR-RI menyerap dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Untuk itu, anggota DPR-RI secara priodik menjalin komunikasi dengan rakyat agar dapat mengetahui *real needs* rakyat. Kepentingan rakyat ini selanjutnya diformulasikan oleh Anggota DPR-RI dan dijadikan masukan pada program-program pemerintah. Dengan demikian pembangunan sudah menerapkan sistem *bottom-up* dan *pro* kepentingan rakyat.

## **Permasalahan**

Sebagai wakil rakyat, anggota DPR adalah agen perubahan yang memiliki peran penting dalam pembangunan. Anggota DPR-RI berperan untuk mempengaruhi pemerintah agar kebijakan berpihak kepada kepentingan rakyat. (Kotler &

Kotler dalam Newman 1999; Rogers dalam Severin & Thankar 2005). Dengan segala kompetensi yang dimilikinya anggota DPR dapat mempengaruhi pemerintah agar menyusun program pembangunan yang menjawab kepentingan rakyat tersebut. Salah satu kompetensi yang berperan dalam mempengaruhi pemerintah adalah kemampuan retorik dalam komunikasi politik. Kemampuan anggota DPR-RI dalam memilih pesan komunikasi, memilih argumentasi dan cara penyampaiannya sewaktu berkomunikasi dengan pemerintah.

Sesuai pasal 79 UU No. 27 Tahun 2009 menyatakan, kewajiban DPR-RI antara lain adalah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah dan menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Aspirasi dari masyarakat dapat digunakan sebagai bahan penyusunan program pembangunan pemerintah.

Sejauh ini masih sangat minim informasi tentang apa isi komunikasi antara DPR-RI dengan pemerintah. Penelitian Emrus (2009) mengatakan, kandungan pesan komunikasi DPR lebih dominan kepentingan partai daripada kepentingan masyarakat. Selanjutnya pemberitaan media massa akhir Juli 2010, hasil reses anggota DPR-RI banyak yang ‘nihil’, (Suara Pembaruan, 29 Juli 2010). Artinya anggota DPR-RI tidak mencari masukan sewaktu reses. Anggota DPR-RI tidak memaksimalkan peluang berkomunikasi dengan masyarakat untuk mencari masukan. Anggota DPR-RI melakukan reses menghabiskan anggaran besar tetapi tidak banyak permasalahan rakyat yang mereka bawa untuk dijadikan masukan dalam penyusunan program pemerintah.

Atas gejala tersebut, perlu diteliti:

1. Apa isi komunikasi anggota DPR-RI dalam berkomunikasi dengan pemerintah.

2. Kepentingan siapa yang dikandung oleh pesan DPR-RI ketika RDP dengan pemerintah?
3. Bagaimana bentuk argumentasi anggota DPR-RI yang digunakan untuk meyakinkan pemerintah?

DPR-RI tahun 2009-2014 membentuk sebelas komisi yang mengurus semua permasalahan dan kepentingan rakyat. Komisi IV DPR-RI salah satu komisi yang khusus mengurus bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan. Komisi IV DPR mengadakan RDP dengan mitra kerjanya dari pemerintah yang menangani bidang tersebut. Komisi IV sejatinya banyak mengusung kepentingan rakyat, karena pertanian adalah bidang kehidupan dominan masyarakat Indonesia. Pada kesempatan ini, penelitian dibatasi pada RDP antara Komisi IV DPR-RI dengan Kementerian Pertanian tahun 2010.

Setiap RDP antara Komisi IV dengan Kementerian Pertanian selalu dibuat dokumen atau risalah yang dapat menggambarkan kegiatan komunikasi selama rapat. Dokumen tersebut ditulis sebagaimana adanya dalam rapat.

Memperhatikan gejala-gejala di atas penelitian ini merumuskan permasalahan pokok yaitu Kepentingan siapa yang dikandung oleh pesan komunikasi dan bentuk argumentasi apa yang digunakan Anggota Komisi IV DPR-RI dalam RDP dengan Kementerian Pertanian tahun 2010? Dari permasalahan tersebut dirumuskan judul penelitian Kepentingan dan Bentuk Argumentasi Pesan Komunikasi Anggota Komisi IV DPR-RI dalam RDP dengan Kementerian Pertanian Tahun 2010.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Isi kandungan pesan komunikasi Anggota Komisi IV DPR-RI dalam RDP dengan Kementerian Pertanian tahun 2010.
2. Bentuk argumentasi yang digunakan oleh Anggota Komisi IV DPR-RI dalam RDP dengan Kementerian Pertanian tahun 2010

### **Peran Komunikasi**

Komunikasi adalah darahnya kehidupan sosial. Sebagai makhluk sosial manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Sewaktu melakukan interaksi sosial, manusia melakukan komunikasi. Melalui komunikasi setiap individu dapat bertukar informasi, berbagi rasa atau pendapat sehingga dapat bekerjasama dalam kehidupan. Melalui komunikasi sikap, pendapat, kebutuhan, orang lain dapat dipahami sehingga tercipta kerjasama, (Kashima, Klein and Clark dalam Fiedler 2007). Di samping itu, dalam berkomunikasi terkandung hubungan emosional seperti rasa hormat, rasa solidaritas, keadaan status sosial, dan kekuasaan yang mereka miliki. (Fetzer 2008).

Komunikasi telah banyak didefinisikan para ahli. Tercatat 126 definisi komunikasi telah dirumuskan. Misalnya Barelson mengatakan, komunikasi adalah ketika seseorang sumber mengirimkan pesan kepada penerima dengan maksud untuk mempengaruhi perilaku penerima. (Ruben 1992). Sementara Shannon dan Weaver mengatakan termasuk dalam komunikasi adalah bagaimana cara seseorang memengaruhi pikiran orang lain dengan cara menyampaikan pesan dalam hal ini bukan hanya pesan tertulis tetapi dapat juga berupa pesan lisan. (Ruben 1992)

Dalam perkembangannya komunikasi menjadi ilmu yang banyak dipelajari. Karena komunikasi bukan hanya berperan menyampaikan informasi dan perasaan tetapi dapat mempengaruhi orang lain agar

berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi harus dilakukan terencana dan terukur agar dapat menimbulkan efek yang diharapkan. (Mulyana 2007). Penerapan komunikasi terjadi sebanyak bidang kehidupan manusia seperti, perdagangan, organisasi, politik dan pemerintahan, media massa, pendidikan dan kesehatan. Sehingga kajian ilmu komunikasi pun semakin beragam (Littejohn dan Foss: 2008).

Komunikasi dalam dunia politik banyak menarik perhatian dan intens dipelajari. Karena dalam komunikasi politik berupaya untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan serta mempengaruhi kebijakan politik. Dalam memperoleh kekuasaan, menggunakan kekuasaan dan mempengaruhi kebijakan yang efektif diperlukan komunikasi. Sebagaimana sudah dipraktekkan oleh Goebels dahulu semasa pemerintahan Hitler, komunikasi propaganda sangat ampuh untuk melemahkan musuh lalu memenangkan pertempuran.

### **Retorika**

Retorika merupakan keterampilan berkomunikasi di depan publik agar audien terpukau dan mengikuti apa yang disampaikan oleh pembicara. (Griffin 2006) Retorika merupakan keahlian berkomunikasi lisan di depan publik agar dapat memukau pendengar. Orang pintar berpidato disebut orator. Istilah retorika diperkenalkan oleh Plato dan Aristoteles dan sekarang banyak disejajarkan dengan persuasi (Berger et.al 2010), karena persuasi dan retorika menekankan bagaimana menyusun strategi komunikasi agar dapat mengusai audien.

Dalam retorika yang perlu diperhatikan ada tiga faktor yaitu etiket (*ethos*), emosional (*pathos*), dan logika (*logos*), (Griffin 2006; Litlejohn & Foss 2008).

Faktor *ethos* adalah kredibilitas pembicara atau komunikator. Kredibilitas

diartikan sebagai “‘good’ man, or a ‘credible’ speaker or a ‘charismatic’ leader” (Burgoon 1974); kualitas inteligensi pembicara, kejujuran, *goodwill* (Griffin 2006). Sementara menurut Petty & Cacioppo, (1981) Tan (1981) seorang sumber atau komunikator memiliki daya persuasi yang baik apabila memiliki unsur *credibility, trustworthiness, attractiveness, and power*.

Faktor *pathos* adalah kemampuan seseorang untuk menyajikan komunikasi secara menarik. Kemampuan menarik perhatian dan emosional audien disebut juga *competence atau communication skills*. (Reardon 1987; Berlo 1960). Kompetensi seseorang yang dimaksud adalah kemampuan dalam berbahasa, memilih istilah, menyusun kalimat, dan menyajikannya. (Anderson and Martin 1995). Wiemann (*dalam* Rubin, Palmgreen, Sypher 2004) mengatakan kompetensi komunikasi dapat digambarkan sebagai *ability to choose available communicative behavior to accomplish one’s own interpersonal goals during an encounter while maintaining the face and line of fellow interactants within the constraints of the situation*. Kompetensi komunikasi meliputi *cognitive ability* dan *behavioral ability* (Ruben 1992; Spitzberg and Canary 1985 *dalam* Anderson and Martin 1995).

Faktor *logos* adalah memilih dan menyusun argumentasi pesan yang disampaikan sehingga audien menerima isi pesan Seperti melakukan *invention, arrangement, style, memory and delivery*. (Litlejohn & Foss 2008; Griffin 2006).

*Invention* yang dimaksud adalah kemampuan komunikator memilih argumentasi sesuai dengan topik yang dibicarakan. Komunikator dapat menemukan argumentasi yang tepat dan sesuai dengan pembicaraan yang dilakukan. *Arrangement* artinya menyusun pesan sehingga mudah dipahami. *Style* artinya memilih metaphora atau ilustrasi dalam pesan yang membuat

pendengar mudah memahami pesan yang disampaikan. *Metaphora* dapat diartikan sebagai ilustrasi atau gambaran pendukung pesan seperti bukti-bukti berupa fakta atau realitas lainnya sehingga pendengar mendapat gambaran yang lebih jelas. *Memory* artinya pembicara memiliki kapasitas dan perbendaharaan istilah yang tepat dan cukup untuk mengungkapkan pesan yang dimaksudkan. *Delivery* artinya penyajian pesan komunikasi yang alami dan menarik.

Keahlian retorika dalam perkembangannya bukan hanya untuk berpidato di depan publik. Retorika juga dibutuhkan dalam berdiskusi, rapat atau perdebatan pendapat.

### **Komunikasi Kelompok**

Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan lebih dari dua orang untuk tujuan tertentu. Komunikasi kelompok banyak ditemui pada organisasi, kelompok diskusi atau rapat. Komunikasi kelompok terbentuk disebabkan oleh adanya tujuan yang sama atau untuk memecahkan masalah bersama, (Goldberg dan Larson 1985). Komunikasi dalam rapat kelompok banyak dilangsungkan dalam pertemuan tatap muka untuk membahas suatu persoalan. Antara peserta dapat menyampaikan pesan dan langsung mendapat tanggapan dari peserta lain. Anggota kelompok berdiskusi mendengar dan bertanya antara sesama anggota. Anggota kelompok belajar dari anggota kelompok lain tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana bersikap, dan bagaimana membangun rasa saling percaya di antara mereka. Pendapat mereka kadang mendukung atau menolak pendapat anggota lainnya. (Barge dalam Eadie 2009).

Pusat perhatian penelitian komunikasi kelompok adalah bagaimana perilaku komunikasi dan bagaimana proses komunikasi antara anggota kelompok berlangsung seperti tingkah laku individu

dalam diskusi kelompok tatap muka yang kecil seperti rapat. (Siebold, Meyers, Shoham dalam Berger et.all. 2010; Beck and Fish 2000). Penelitian perilaku komunikasi kelompok banyak menyoroti pemilihan topik pembicaraan, gaya berbicara, kejelasan pesan yang disampaikan, orientasi atau motif berkomunikasi, dan frekuensi berkomunikasi, (Goldberg dan Larson 1985; Berger 2000).

Dalam komunikasi sangat penting diperhatikan pertama perencanaan menyampaikan pesan adalah tentukan informasi apa yang akan disampaikan kemudian rencanakan bagaimana cara penyajiannya, (Newsom & Carrell 2001; Larson 2004). Perencanaan pesan yang akan disampaikan adalah memilih apa yang akan dibicarakan yang penting untuk diketahui oleh lawan bicara sehingga dia terpengaruh atas isi pembicaraan tersebut. Setelah itu pilih cara penyampaian yang membuat lawan bicara menjadi lebih yakin. Dalam rapat misalnya, perlu memilih kandungan pesan apa yang menarik untuk diangkat menjadi bahan diskusi atau pembahasan yang ditambah dengan cara penyampaian yang menarik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain seperti retorika sangat penting diperhatikan adalah memilih isi pesan dan argumentasi yang menyertai pesan tersebut.

### **Kepentingan**

Kepentingan dalam pesan komunikasi dapat diartikan sebagai siapa yang mendapat keuntungan atas isi pesan komunikasi. Artinya isi pesan tersebut mengandung keuntungan siapa bila terwujud. Gouran mengatakan, dalam pesan rapat terkandung kepentingan tertentu seperti siapa yang mendapat keuntungan bila isi pesan itu terwujud (Goldberg & Larson 1985)

Sejauh ini belum banyak diteliti tentang perilaku komunikasi anggota DPR

dalam RDP. Karena itu sangat menarik untuk menelitinya. Sesuai dengan judul tulisan ini, apa kandungan pesan komunikasi dan bentuk argumentasi yang digunakan oleh anggota DPR dalam RDP. Sebagai wakil rakyat, Anggota DPR selayaknya banyak menyuarakan kepentingan rakyat daripada kepentingan lainnya.

Secara politik, keentingan dibagi menjadi dua, yaitu kepentingan rakyat, kepentingan pemerintah. Kepentingan rakyat apabila kesejahteraan rakyat secara luas yang di usahakan untuk terapai. Kepentingan pemerintah apabila memudahkan pemerintah secara umum menjalankan pemerintahan. Namun dalam realitas, kepentingan muncul dari pelaku politik seperti kepentingan partai atau pribadi. Kepentingan partai atau pribadi apabila partai atau pribadi mendapat keuntungan secara umum dari tindakan yang dilakukan.

Dalam rapat kerja atau dengar pendapat antara DPR dengan pemerintah, komunikasi berlangsung berupa diskusi dan tanya jawab. Dalam pesan-pesan anggota DPR terdapat kandungan pesan kepentingan yang mengarah pada kepentingan rakyat, kepentingan pemerintah atau kepentingan politisi.

### **Argumen**

Suatu pesan persuasi dengan tema tertentu akan lebih efektif bila mengandung *argument* atau *premise*. *Argument* dan *premise* yang dimaksudkan adalah berupa *proof* atau bukti yang kuat dan cukup. Penyertaan bukti atau *proof* terdiri dari 2 strategi yaitu *reasoning* dan *evidence*, (Larson 2004).

Alasan atau *reasoning* terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebab-akibat, gejala, criteria, perbandingan, dan logika. Sementara penyertaan bukti dapat dikenal berupa pengalaman langsung, dramatisasi naratif, dramatisasi testimony, dramatisasi

anekdot, dramatisasi demonstrasi, dan rasionalisasi, (Larson 2004).

### **Karakteristik**

Sementara menurut Giles & Street (dalam Knapp & Miller 1994) perilaku komunikasi dipengaruhi faktor perbedaan individual seperti *personality*, *psychological*, *sociodemographic*. Hal senada juga dikemukakan oleh Rakhmat (2001) yang mengatakan bahwa perilaku komunikasi dipengaruhi oleh faktor personal dan faktor sosial atau lingkungan. Pilihan kandungan isi pesan, kandungan kepentingan, dan bentuk argumentasi dalam komunikasi dipengaruhi oleh latarbelakang karakteristik seseorang.

Bila dikaitkan dengan judul tulisan ini, kandungan kepentingan dalam pesan komunikasi dan argumen dipengaruhi perbedaan karakteristik pelakunya. Karakteristik yang dimaksud adalah karakteristik anggota DPR seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, fraksi, dan masa bakti.

### **Metode Penelitian**

Untuk menggambarkan kandungan kepentingan dan bentuk argumentasi dalam pesan komunikasi Anggota Komisi IV DPR-RI dengan Kementerian Pertanian tahun 2010 digunakan metode analisis isi (*content analysis*). Metode analisis isi sangat tepat untuk menggambarkan isi pesan komunikasi yang tersurat secara obyektif dan kuantitatif (Rakhmat 1984; Wimmer & Dominick 2000; Krippendorf 1993; Stempel III, Weaver and Wilhoit 2003; Emmert & Barker 1989). Penelitian ini akan melihat kandungan pesan dan bentuk argumentasi melalui naskah tertulis yang telah dibuat oleh Sekretarit Komisi IV.

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perilaku komunikasi anggota kelompok kecil melalui pesan, pernah dilakukan oleh Burstein dan Goodman (1988). Dalam penelitian tersebut Burstein

dan Goodman mendeskripsikan perilaku komunikasi anggota kelompok ditinjau dari pesan komunikasi yang termuat dalam hasil rekaman pembicaraan selama anggota kelompok mengikuti *training*. Dengan demikian, melihat perilaku komunikasi dapat dilakukan dengan analisis isi.

## **Bahan Penelitian dan Priode**

Bahan penelitian ini adalah Notulensi RDP antara Anggota Komisi IV DPR-RI dengan Kementerian Pertanian selama tahun 2010. Dokumen tersebut berisi catatan tentang pesan komunikasi selama rapat berlangsung antara Anggota Komisi IV DPR-RI kepada Kementerian Pertanian. Selama rapat, semua peristiwa komunikasi direkam memakai *tape recorder*. Hasil rekaman tadi selanjutnya ditranskrip oleh Sekretariat Komisi IV DPR-RI menjadi dokumen.

Dalam penelitian ini hanya mendeskripsikan pesan yang disampaikan oleh anggota komisi DPR-RI selama RDP. Sedangkan pesan dari pihak Kementerian Pertanian tidak diteliti.

## **Definisi Kategori**

### **1. Muatan kepentingan**

Isi atau muatan komunikasi menyangkut kandungan pesan yang menjadi bahan pembicaraan. Muatan komunikasi menggambarkan kepentingan pihak mana yang dikandung oleh pesan tersebut. Muatan kepentingan tersebut dalam konteks RDP anggota DPR dapat dikelompokkan menjadi 3 sub kategori, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan pemerintah dan kepentingan para pribadi atau partai.

- a. Kepentingan masyarakat, yaitu pesan yang disampaikan dalam rapat mengandung kepentingan masyarakat umum atau konstituen yaitu yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah sarana produksi pertanian.
- b. Kepentingan pemerintah, yaitu pesan yang disampaikan dalam rapat

memaklumi, menyetujui atau mendukung kebijakan pemerintah dalam bidang sarana produksi pertanian.

- c. Kepentingan politisi, yaitu pesan yang disampaikan dalam rapat mengindikasikan kepentingan pribadi atau partai.

## **2. Bentuk Argumentasi**

### **a. Jenis alasan**

Jenis alasan yang digunakan oleh pembicara untuk mendukung pernyataan/pertanyaannya agar pesan lebih dipercaya. Alasan atau *reasoning* terdiri dari: sebab-akibat, gejala, kriteria, perbandingan, logika, dan tidak memiliki alasan.

1. Sebab akibat, yaitu pesan yang menggambarkan suatu persoalan dengan mengemukakan faktor-faktor penyebab suatu permasalahan.
2. Gejala, yaitu pesan yang menggambarkan kesimpulan dengan dukungan fakta-fakta peristiwa yang aktual terjadi di satu tempat dan tempat lain yang sejenis.
3. Kriteria, yaitu pesan yang berisi penilaian dengan menggunakan acuan (patokan) yang meliputi, metode, cara, dan kualifikasi tertentu.
4. Perbandingan, yaitu pesan yang berisi penilaian dengan menyandingkan beberapa data, hasil, atau metode yang digunakan pihak lain.
5. Logika, yaitu pesan yang berisi penggunaan akal sehat untuk mendukung pesan yang disampaikan.
6. Tidak memiliki alasan apabila tidak memenuhi salah satu kategori bentuk alasan di atas.

### **3. Bentuk bukti**

Bentuk bukti suatu pemberian alasan dalam pernyataan/pertanyaan dengan menampilkan bukti-bukti. Bentuk bukti terdiri dari: pengalaman, dramatisasi, rasionalisasi, dan tidak memiliki bukti.

1. Pengalaman, yaitu pesan yang menceritakan bukti apa yang dialami atau didengar dari pengalaman orang lain.
2. Dramatisasi naratif, yaitu suatu pesan yang menggambarkan suatu obyek secara rinci.
3. Dramatisasi testimony, yaitu suatu pesan yang didukung oleh pernyataan orang lain.
4. Dramatisasi anekdot, yaitu suatu pesan yang menggunakan kisah lucu atau sindiran secara halus.
5. Dramatisasi demonstrasi, yaitu suatu pernyataan/pertanyaan yang menggunakan contoh peragaan sederhana yang mudah ditiru orang lain sebagai pendukung argumentasinya.
6. Rasionalisasi, yaitu suatu pernyataan/pertanyaan yang menggunakan sistematis logika atau akal sehat sebagai pendukung argumentasinya.
7. Tidak memiliki bukti, yaitu suatu pernyataan/pertanyaan tidak mengandung salah satu bentuk bukti di atas.

### **Populasi dan Sampel**

Selama tahun 2010 banyak rapat telah dilakukan antara Komisi IV DPR-RI dengan. Populasi penelitian ini adalah seluruh dokumen acara RDP Anggota Komisi IV DPR-RI dengan Kementerian Pertanian tahun 2010. Penelitian ini menjadikan seluruh dokumen acara RDP Anggota Komisi IV DPR-RI dengan Kementerian Pertanian tahun 2010. Penelitian ini tidak mengambil sampel dan dokumen rapat yang ada, Penelitian ini melakukan sensus terhadap semua bahan dokumen RDP Anggota Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian tahun 2010.

### **Unit Analisis**

Unit analisis adalah satuan terkecil suatu naskah yang dapat dijadikan untuk melihat kategori analisis isi (Emmert & Barker 1989; Rakhmat 1984; Wimmer &

Dominick 2000; Kippendorf 1993; Stempel III, Weaver and Wilhoit 2003). Unit analisis penelitian adalah naskah rekaman RDP Anggota DPR-RI Komisi IV dengan Kementerian Pertanian tahun 2010.

Unit analisis katerori muatan kepentingan dan bentuk argumentasi adalah : paragraph.

### **Reliabilitas Kategori**

Uji reliabilitas kategori penelitian ini dilakukan dengan cara pengujian dengan menggunakan juri sebanyak 3 orang. Hasil uji coba juri selanjutnya akan dihitung koefisien reliabilitas menggu-

nakan rumus Holsti :  $r = \frac{2M}{N_1 + N_2}$ .

Koefisien reliabilitas yang dapat diterima menurut Holsti  $r > 0,7$ . (Rakhmat 1984; Emmert & Barker 1989; Wimmer & Dominick 2000; Kippendorf 1993; Stempel III, Weaver and Wilhoit 2003). Hasil perhitungan koefisien reliabilitas masing-masing kategori adalah Muatan kepentingan:  $r = 0,87$  dan Bentuk Argumentasi  $r = 0,80$ .

### **Analisis data**

Data yang dikumpulkan diolah menggunakan statistik deskriptif dan uji korelasi *non parametric Kendall Thau*.

### **Hasil dan Pembahasan**

Sebagai representasi rakyat, kewajiban anggota DPR menyerap aspirasi masyarakat yang dijadikan masukan dalam menjalankan tugasnya. Tugas pokok anggota DPR terdiri dari tiga, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

Anggota DPR priode 2009-2014 adalah hasil pemilihan dari 11.219 calon legislatif dan 77 daerah pemilihan. Bila dibandingkan penduduk Indonesia tahun 2010 sebanyak 237,641,326 (Kompas 2010; BPS 2010) dengan jumlah anggota DPR 2009-2014 sebanyak 560 orang,



maka setiap anggota DPR mewakili sekitar 424.360 penduduk.

### **Badan kelengkapan**

Berkaitan dengan penguatan dan p engefektifan kelembagaan DPR-RI, dalam menjalankan fungsinya membentuk alat kelengkapan Pembentukan alat kelengkapan DPR agar dapat menampung semua persoalan kenegaraan. Alat kelengkapan DPR-RI antara lain Panitia Khusus dan Komisi.

### **Komisi**

Komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat: mengadakan Rapat kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan RDP dengan pejabat pemerintah yang mewakili intansinya, mengadakan RDP Umum, mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses.

Dalam RDP atau Rapat Kerja, Komisi mengundang pemerintah datang ke kantor DPR untuk memberikan penjelasan tentang masalah yang ditemukan oleh anggota komisi selama mengadakan kunjungan kerja atau reses.

### **Komisi IV DPR-RI**

Sebelum mendeskripsikan kandungan isi pesan dan bentuk argumentasi, terlebih dahulu digambarkan karakteristik Anggota DPR-RI Komisi IV yang beranggotakan 53 orang. Umumnya anggota setiap komisi berkisar antara 51 – 52 orang. Namun dalam praktek, perjalanan waktu sering ada perpindahan sehingga dapat mencapai 53 orang. Anggota DPR RI Komisi IV pada penelitian ini adalah semua yang pernah mengemukakan pendapat dalam RDP dengan Kementerian Pertanian tahun 2010.

## **Karakteristik Anggota DPR Komisi IV Fraksi**

Anggota DPR-RI Komisi IV terdiri dari 53 orang yang diwakili oleh 9 fraksi. Jumlah anggota setiap fraksi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1  
Anggota DPR-RI Komisi IV  
berdasarkan Fraksi. n=53

| No.           | Fraksi   | F         | %            |
|---------------|----------|-----------|--------------|
| 1             | Demokrat | 12        | 22.6         |
| 2             | Golkar   | 10        | 18.9         |
| 3             | PDIP     | 10        | 18.9         |
| 4             | PKS      | 6         | 11.3         |
| 5             | PAN      | 4         | 7.5          |
| 6             | PPP      | 4         | 7.5          |
| 7             | PKB      | 3         | 5.7          |
| 8             | Gerindra | 2         | 3.8          |
| 9             | Hanura   | 2         | 3.8          |
| <b>Jumlah</b> |          | <b>53</b> | <b>100.0</b> |

Tabel di atas menunjukkan bahwa Anggota DPR-RI Komisi IV dari Fraksi Partai Demokrat terdiri dari 12 orang (22,6 %) yang disusul oleh Fraksi Partai Golongan Karya dan Partai PDIP masing-masing 10 orang (18,9 %). Fraksi Partai PKS sebanyak 6 orang (11,3 %), Fraksi Partai PAN dan Partai PPP masing-masing 4 orang (7,5 %), Fraksi Partai PKB sebanyak 3 orang (5,7 %) dan Fraksi Partai Gerindra dan Partai Hanura masing-masing 2 orang (3,8%)

Jumlah anggota yang besar dapat menguntungkan bagi Fraksi, karena dalam RDP akan terjadi saling dukung antara sesama anggota fraksi. Jumlah yang besar akan sangat berarti terutama dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan *voting*. Sebaliknya jumlah anggota yang kecil, akan sedikit pula memperoleh dukungan sesama anggota fraksi. Fraksi

Partai Demokrat adalah partai pemerintah yang berkuasa. Fraksi dari partai pemerintah berkuasa cenderung mendukung dan membela kebijakan pemerintah dalam rapat. Karena fraksi Demokrat adalah bagian dari pemerintah yang berkuasa.

Enam fraksi terbesar DPR adalah tergabung dalam partrai politik koalisi pemerintah. Enam fraksi yang dimaksud adalah (Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PKB, dan PPP). Dapat diduga anggota partai koalisi akan mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam kontrak politik yang sudah disepakati, partai koalisi memiliki kewajiban moral untuk mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

### **Jenis kelamin**

Tabel 2  
Anggota DPR-RI Komisi IV berdasarkan jenis kelamin. N=53

| No.    | Jenis_kelamin | F  | %     |
|--------|---------------|----|-------|
| 1      | Laki-laki     | 47 | 88.7  |
| 2      | Perempuan     | 6  | 11.3  |
| Jumlah |               | 53 | 100.0 |

Anggota DPR-RI Komisi IV lebih banyak laki-laki yaitu sebanyak 88,6%. Keterwakilan perempuan di komisi IV DPR-RI sebanyak 11,3 %. Data ini menunjukkan bahwa perempuan kurang tertarik komisi IV yang membidangi pertanian. Data ini sekaligus mengindikasikan bahwa perempuan kurang tertarik pada politik, karena tidak banyak yang mencalonkan diri dan terpilih sewaktu pemilihan umum tahun 2009.

Sebagaimana hasil penelitian Diekman & Schneider (2010) menunjukkan masih kuatnya pengaruh *social role theory* di masyarakat. Dalam teori peran social antara laki-laki dan perempuan sering dibedakan. Perempuan berperan mengurus rumah dan tinggal di rumah se-

dangkan laki-laki berperan sebagai pencari nafkah bekerja di luar rumah. Politik adalah dunia laki-laki sedangkan masakan adalah dunianya perempuan (dalam Krolekke & Sorensen 2006). Hasil penelitian Barton dan Bucy (2008) terhadap artikel publikasi dari tahun 1993 – 2006 terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan lebih sedikit (23,7%) yang tertarik menulis masalah politik sedangkan laki-laki lebih dominan (76,3%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketertarikan perempuan dalam komunikasi politik cenderung lebih rendah daripada laki-laki.

Bila jumlah dan ketertarikan perempuan dalam legislatif rendah, maka kepentingan perempuan kurang teraktualisasikan. Karena suara yang memperjuangkan kepentingan mereka akan kecil. Hanya perempuan yang mengetahui secara persis kepentingan perempuan. Walaupun laki-laki bersedia memperjuangkan kepentingan perempuan, namun laki-laki tidak mengerti sepenuhnya apa yang diinginkan oleh perempuan, (Kramarae dalam Griffin 2006). Diharapkan tumbuhnya kesadaran dan ketertarikan perempuan dalam bidang politik sehingga kepentingan perempuan dapat diperjuangkan dalam setiap kebijakan politik yang dihasilkan. (Soetjipto 2000).

### **Usia**

Anggota DPR-RI Komisi IV memiliki rentang usia termuda 33 tahun dan tertua berusia 68 tahun. Karena jarak usia mereka yang termuda dan tertua cukup jauh, maka dijadikan beberapa kelompok. Rentang usia dalam masing-masing kelompok adalah 10 tahun. Berikut ini gambaran kelompok usia Anggota DPR-RI Komisi IV:

Tabel 3  
Anggota DPR-RI Komisi IV berdasarkan usia. n=53

| No.           | Kelompok usia | F         | %            |
|---------------|---------------|-----------|--------------|
| 1             | ≤ 40 tahun    | 6         | 11.3         |
| 2             | 41-50 tahun   | 19        | 35.8         |
| 3             | 51-60 tahun   | 20        | 37.8         |
| 4             | < 60 tahun    | 8         | 15.1         |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>53</b> | <b>100.0</b> |

Usia Anggota DPR-RI Komisi IV lebih banyak (37,7 %) berada pada kelompok 51-60 tahun. Urutan kedua adalah kelompok usia 41- 50 tahun sebanyak 35,8 %. Kelompok usia lebih dari 60 tahun sebanyak 15,1% dan usia dibawah 41 tahun sebanyak 11,3%.

Data tersebut menunjukkan bahwa usia anggota DPR-RI Komisi IV dominan pada usia di atas 40 tahun. Usia di atas 40 tahun menunjukkan kedewasaan dan kematangan psikologis.

Hal ini sejalan dengan *social learning theory* (Bandura 1997), di mana manusia selama hidupnya adalah proses belajar. Masa hidup atau usia telah menuntun seseorang untuk dapat memilih tindakan yang tepat dalam menghadapi persoalan hidup. Usia yang semakin tua akan semakin matang secara psikologis. Dengan kedewasaan dan kematangan psikologis tersebut dalam menilai sesuatu persoalan lebih mengedepankan kearifan daripada emosional.

## Agama

Tabel 4  
Anggota DPR-RI Komisi IV berdasarkan agama. n=53

| No.           | Agama     | F         | %            |
|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 1             | Islam     | 41        | 77.3         |
| 2             | Protestan | 7         | 13.2         |
| 3             | Hindu     | 3         | 5.7          |
| 4             | Budha     | 1         | 1.9          |
| 5             | Katholik  | 1         | 1.9          |
| <b>Jumlah</b> |           | <b>53</b> | <b>100.0</b> |

Anggota DPR-RI Komisi IV lebih banyak (77,3%) yang memeluk agama Islam, disusul Protestan 13,2%, Hindu 5,7%, Budha dan Katholik masing-masing 1,9%. Gambaran ini menunjukkan kondisi agama yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Agama Islam lebih banyak karena mayoritas masyarakat beragama Islam.

Anggota Komisi IV DPR-RI dilihat dari agama, mewakili semua agama yang ada di Indonesia. Jumlah anggota setiap agama cukup proporsional sesuai dengan jumlah penganut agama masyarakat di Indonesia. Peran agama sangat penting dalam banyak. Karena agama adalah kepercayaan yang mengandung nilai banyak dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai suatu persoalan. Panatisme agama pada masyarakat Indonesia sangat kuat, sehingga nilainya sering masuk dalam setiap persoalan kehidupan.

## Pendidikan

Tabel 5  
Anggota DPR-RI Komisi IV berdasarkan pendidikan. n=53

| No.           | Pendidikan     | F         | %            |
|---------------|----------------|-----------|--------------|
| 1             | SMU/ sederajat | 6         | 11.3         |
| 2             | S1             | 22        | 41.5         |
| 3             | S2             | 20        | 37.8         |
| 4             | S3             | 5         | 9.4          |
| <b>Jumlah</b> |                | <b>53</b> | <b>100.0</b> |

Tingkat pendidikan anggota DPR-RI Komisi IV paling banyak (41,5%) adalah Sarjana strata satu disusul Sarjana strata dua 37,8%. Anggota Komisi IV yang berpendidikan Sarjana Strata tiga sebanyak 9,4 %. Sedangkan tingkat pendidikan SMU atau sederajat sebanyak 11,3 %.

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang dominan sarjana

akan menunjukkan kualitas berpikir dan daya analitis yang sangat baik. Pendidikan yang tinggi dapat mengarahkan seseorang untuk lebih mengedepankan rasionalitas dalam menghadapi masalah. Sedangkan pendidikan yang kurang sering mengedepankan emosional dalam menghadapi masalah. Dengan demikian pendidikan Anggota Komisi IV yang tinggi merupakan modal yang sangat baik dalam pembahasan agenda rapat. Mereka dalam membahas persoalan mengutamakan pendekatan rasional, kritis, tidak emosional, pandangan luas, dan tidak cepat puas. Pada gilirannya hasil pembahasan agenda rapat akan lebih komprehensif dan berkualitas.

Perbedaan tingkat pendidikan dan pengalaman membawa kemampuan komunikasi yang berbeda pula. Sebagaimana dikemukakan oleh Delia (dalam Griffin 2006) perbedaan pendidikan dan pengalaman dapat membuat kompleksitas kognitif seseorang berbeda. Kompleksitas kognitif yang dimaksud adalah kemampuan atau kesempurnaan otak untuk mengkonstruksi realias serta mengorganisir ingatan. Kognitif yang kompleks adalah orang yang memiliki kemampuan dan kesempurnaan otak yang baik untuk mengkonstruksi realitas atau mengorganisir ingatan. Perbedaan kompleksitas kognitif akan berpengaruh kepada kemampuan melakukan komunikasi. Pendidikan dan pengalaman yang cukup akan semakin baik kemampuan berkomunikasi.

### **Pekerjaan**

Pekerjaan Anggota DPR-RI Komisi IV dalam kesempatan ini adalah pekerjaan awal sebelum menjadi Anggota DPR. Berikut ini data jenis pekerjaan Anggota DPR-RI Komisi IV. (lihat tabel 6)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pekerjaan Anggota DPR-RI Komisi IV sebelum terpilih menjadi anggota legislatif lebih banyak (34%) sebagai pengusaha. Bekerja sebagai aktivis sebanyak 26,4%,

sebagai kader partai sebanyak 26,4%, bekerja sebagai dosen sebanyak 5,6 %, sebagai PNS sebanyak 3,8%, dan sebagai TNI/Polri sebanyak 3,8%.

Tabel 6  
Anggota DPR-RI Komisi IV berdasarkan pekerjaan. n=53

| No.    | Pekerjaan    | F  | %     |
|--------|--------------|----|-------|
| 1      | Pengusaha    | 18 | 34.0  |
| 2      | Aktivis      | 14 | 26.4  |
| 3      | Kader partai | 14 | 26.4  |
| 4      | Dosen        | 3  | 5.6   |
| 5      | PNS          | 2  | 3.8   |
| 6      | TNI/Polri    | 2  | 3.8   |
| Jumlah |              | 53 | 100.0 |

Pekerjaan sebelum menjadi anggota DPR-RI di dominasi oleh pengusaha bukan politisi merupakan gejala bergesernya peminat dunia politik. Idealnya peminat menjadi anggota DPR adalah para politisi yang sudah memilih dan mengabdikan dirinya pada dunia politik. Sedangkan pengusaha adalah pekerjaan yang cenderung memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Menurut para ahli motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang (Robbin & Coulter 2007). Semoga saja motif-motif ekonomi tidak semata-mata mendorong seseorang menjadi anggota DPR-RI.

Gejala maraknya pengusaha berminat memasuki dunia politik sudah mulai terlihat pada 2 pemilu terakhir. Hal ini disebabkan oleh besarnya biaya politik yang dibutuhkan untuk menjadi politisi seperti menjadi anggota DPR.

Namun bila kader partai dan aktivis dapat diapandang sebagai sama-sama

ranah politik, maka proporsi bidang pekerjaan anggota DPR Komisi IV sebelum menjadi anggota legislatif didominasi oleh bidang politik (26,4% + 26,4% = 52,8%). Hal ini memberi arti bahwa pekerjaan sebagai politisi sudah digeluti sehingga komunikasi politik sudah terbiasa dilakukan sebelum terpilih menjadi anggota legislatif. Kegiatan komunikasi yang berhubungan dengan usaha memperoleh dan berbagi kekuasaan serta usaha untuk mempengaruhi orang lain sering dilakukan.

### **Masa bakti**

Masa bakti yang dimaksud adalah waktu yang dilalui menjadi anggota DPR. Masa bakti dapat juga dikatakan pengalaman, yaitu priode yang sudah ditempuh menjadi anggota DPR. Berapa priode seseorang telah menjadi anggota DPR. Sedangkan priode adalah masa jabatan yang sudah dilalui sebagai anggota DPR. Satu priode sudah ditetapkan 5 tahun. Priode pertama artinya baru tahun 2009-2014 menjadi anggota DPR. Berikut ini data masa bakti Anggota DPR Komisi IV:

Tabel 7  
Anggota DPR-RI Komisi IV  
Berdasarkan Masa Bakti. n=53

| No.    | Masa Bakti     | F  | %     |
|--------|----------------|----|-------|
| 1      | Priode pertama | 30 | 56.6  |
| 2      | Priode kedua   | 12 | 22.6  |
| 3      | Priode ketiga  | 8  | 15.1  |
| 4      | Priode keempat | 1  | 1.9   |
| 5      | Priode keenam  | 2  | 3.8   |
| Jumlah |                | 53 | 100.0 |

Tabel di atas menunjukkan bahwa lebih banyak (56,6%) Anggota Komisi IV baru priode pertama menjadi anggota DPR. Berpengalaman dua priode sebanyak, 22,6 %, tiga priode 15,1%, empat priode 1,9% dan enam priode sebanyak 3,8%. Artinya pengalaman mereka menjadi anggota DPR-RI baru beranjak 2 tahun (2009-2010).

Bila ditinjau lebih lanjut, Anggota Komisi IV yang berpengalaman priode pertama berasal dari Demokrat, Gerindra, dan Hanura. Partai Demokrat, Hanura, dan Gerindra adalah partai yang baru berdiri dan mengikuti dua masa pemilihan umum 2004-2009 dan 2009-2014. Partai ini masih dapat dinilai baru dalam dunia politik.

Sedangkan anggota yang berpengalaman priode ketiga ke atas berasal dari partai lama seperti Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketiga partai ini sudah berdiri sejak pemerintahan orde baru. Pengalaman anggota partai ini dalam dunia politik sudah sangat banyak.

Pengalaman yang kurang dapat menjadi faktor kurang memahami mekanisme kerja dan persoalan yang dihadapi. Sebagaimana telah dikemukakan dalam *social learning theory* di atas.

### **Agenda Rapat**

Anggota DPR RI Komisi IV telah mengadakan RDP dengan Kementerian Pertanian. Selama tahun 2010 sebanyak 7 kali yang meliputi agenda. Setiap agenda rapat digambarkan waktu, tindak komunikasi, jumlah paragraph, dan jumlah kalimat yang dihasilkan.

JTabel 8  
Agenda, Waktu, Tindak Komunikasi, Paragraph, dan Kalimat dalam RDP Komisi IV dengan Kementerian Pertanian Tahun 2010. n=7

| No | Agenda  | Waktu                      | Tindak Komunikasi | Paragraf | Kalimat |
|----|---|----------------------------|-------------------|----------|---------|
| 1  | Realisasi Anggaran Tahun 2009 dan Rencana Anggaran tahun 2010   | 7,15 jam<br>(435 menit)    | 79                | 176      | 364     |
| 2. | Public Service Obligation dan subsidi pupuk sector pertanian  | 3,15 jam<br>(195 menit)    | 28                | 104      | 149     |
| 3. | Membahas tindak lanjut kuker Tj. Priuk dan Audiensi Komisi IV dengan Himpunan Pedagang Unggas Jakarta | 5,20 jam<br>(320 menit)    | 35                | 80       | 1336    |
| 4. | Membahas Masalah Beras Miskin (Raskin)  | 3,30 jam<br>(210 menit)    | 33                | 129      | 408     |
| 5. | Program Swasembada daging 2014  | 2,30 jam<br>(150 menit)    | 14                | 54       | 447     |
| 6. | Membahas permasalahan swasembada daging 2014  | 1,15 jam<br>(75 menit)     | 6                 | 24       | 651     |
| 7. | Membahas Swasembada daging (regulasi impor sapi dan daging, regulasi KUPS)                            | 3,55 jam<br>(235 menit)    | 24                | 66       | 710     |
|    | Jumlah  | 27 jam<br>(1620 menit)     | 219               | 633      | 4065    |
|    | Rataan  | 3.52 jam<br>(231,26 menit) | 31,29             | 90.43    | 580.71  |

Dari tabel 8 dapat diketahui tujuh masalah bidang pertanian telah dibahas tahun 2010. Dari rapat telah yang menghasilkan 7 bundel naskah yang isinya terdiri dari 219 tindakan komunikasi dengan rata-rata 31,29, menghasilkan 633 paragraf dengan rata-rata 90,43 paragraf, 4065 kalimat dengan rata-rata 580,71 kalimat dan menghabiskan waktu 27 jam dengan rata-rata 3 jam 52 menit.

Dari 7 jenis persoalan yang dibahas selama tahun 2010, ada dua masalah yang berhubungan langsung dengan petani dan masyarakat bawah, yaitu Subsidi Pupuk dan Beras Untuk Masyarakat Miskin. Sedangkan persoalan lainnya berhubungan tidak langsung dengan kepentingan petani. Keberpihakan kepada

petani tampak lemah dalam memilih agenda RDP selama tahun 2010.

Dilihat dari tindak komunikasi, ketika membahas Realisasi anggaran 2009 dan rencana anggaran 2010 paling banyak anggota DPR komisi IV yang melakukan tindak komunikasi yaitu 79 tindakan dan yang paling sedikit tindak komunikasi ketika membahas Permasalahan swasembada daging 2014 yaitu sebanyak 6 tindakan. Artinya masalah anggaran lebih menarik bagi Anggota Komisi IV daripada masalah lainnya.

Dilihat dari paragraph yang dihasilkan, ketika membahas realisasi anggaran 2009 dan rencana anggaran 2010 paling banyak paragraph yaitu 176 dan paling sedikit ketika membahas Permasalahan

swasembada daging 2014. Artinya masalah anggaran lebih menarik untuk didiskusikan Anggota Komisi IV DPR daripada Permasalahan swasembada daging 2014.

Dilihat dari jumlah kalimat, ketika membahas Tindak lanjut kunker Tj. Priuk dan Audiensi dengan Himpunan Pedagang Unggas Jakarta paling banyak kalimat yang dilontarkan yaitu 1336 kalimat. Paling sedikit kalimat ketika membahas *Public Service Obligation* dan subsidi pupuk sektor pertanian, yaitu sebanyak 149 kalimat. Artinya dalam pembahasan Tindak lanjut kunker Tj. Priuk dan audiensi himpunan pedagang unggas Jakarta intensitas komunikasi lebih tinggi dan kalimat yang

dihasilkan lebih banyak disertai tanya jawab yang serius.

Dilihat dari jumlah waktu yang dihabiskan, ketika membahas Realisasi anggaran 2009 dan rencana anggaran 2010 paling banyak waktu dibutuhkan yaitu 7,15 jam. Dalam membahas Permasalahan swasembada daging 2014 paling sedikit waktu yang dihabiskan yaitu 1,15 jam. Artinya rapat Realisasi anggaran 2009 dan rencana anggaran 2010 lebih alot daripada masalah lainnya.

Bila ditinjau lebih jauh, dalam setiap pembahasan agenda dapat diperoleh rata-rata waktu yang dihabiskan oleh setiap pembicara. Berikut ini adalah data rataan pembahasan agenda setiap pembicara.

Tabel 9  
Rataan waktu dalam setiap tindakan komunikasi dalam RDP Komisi IV dengan Kementerian Pertanian tahun 2010  
N= 7

| No. | Agenda   | Waktu                   | Tindak Komunikasi | Rataan waktu (menit) |
|-----|--|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 1   | Realisasi Anggaran Tahun 2009 dan Rencana Anggaran tahun 2010  | 7,15 jam<br>(435 menit) | 79                | 5,31                 |
| 2.  | <i>Public Service Obligation</i> dan subsidi pupuk sector pertanian                                    | 3,15 jam<br>(195 menit) | 28                | 6,58                 |
| 3.  | Membahas tindak lanjut kunker Tj. Priuk dan Audiensi Komisi IV dengan Himpunan Pedagang Unggas Jakarta | 5,20 jam<br>(320 menit) | 35                | 9,80                 |
| 4.  | Membahas Masalah Beras Miskin (Raskin)   | 3,30 jam<br>(210 menit) | 33                | 6,22                 |
| 5.  | Program Swasembada daging 2014   | 2,30 jam<br>(150 menit) | 14                | 10,43                |
| 6.  | Membahas permasalahan swasembada daging 2014   | 1,15 jam<br>(75 menit)  | 6                 | 12,30                |
| 7.  | Membahas Swasembada daging (regulasi impor sapi dan daging, regulasi KUPS)                             | 3,55 jam<br>(235 menit) | 24                | 9,47                 |
|     | Rataan   |                         |                   | 8.43 menit           |

Namun bila waktu yang dihabiskan dibandingkan dengan jumlah tindakan komunikasi dapat. Rataan waktu

setiap tindak komunikasi paling tinggi terdapat pada saat membahas Permasalahan Swasembada Daging 2014 yaitu 12,30

menit. Artinya setiap pelaku tindak komunikasi membutuhkan waktu rata-rata 12,30 menit dalam menyampaikan pendapatnya. Sementara rata-rata waktu paling singkat dalam setiap tindak komunikasi ditemukan ketika membahas Realisasi anggaran 2009 dan Rencana Anggaran 2010, yaitu 5,31 menit.

Data tersebut memberikan gambaran bahwa Anggota Komisi IV DPR-RI dalam menyampaikan pendapat atau bertanya memerlukan waktu minimal 5 menit. Hal ini penting untuk diperhatikan dalam RDP perlu diperhitungkan waktu agar setiap peserta diberikan waktu sekitar 8,43 menit atau 9 menit.

### **Muatan Kepentingan**

Muatan kepentingan pesan komunikasi anggota DPR-RI Komisi IV dalam RDP dengan Kementerian Pertanian digunakan unit analisis paragraf. Berikut ini hasil analisis muatan kepentingan dalam pesan komunikasi yang dimaksud.

Tabel 10

Muatan kepentingan pesan komunikasi Anggota Komisi IV DPR-RI dalam RDP dengan Kementerian Pertanian Tahun 2010. n= 633

| No. | Muatan Kepentingan | F   | %     |
|-----|--------------------|-----|-------|
| 1   | Masyarakat         | 418 | 66.1  |
| 2   | Pemerintah         | 68  | 10.7  |
| 3   | Pribadi            | 147 | 23.2  |
|     | Jumlah             | 633 | 100.0 |

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa 66,1% pesan komunikasi memuat kepentingan masyarakat, 23,2% memuat kepentingan pribadi dan 10,7% memuat kepentingan pemerintah. Artinya anggota DPR-RI Komisi IV dalam menyampaikan pendapat atau bertanya kepada Kementerian Pertanian lebih banyak menyampaikan kepentingan masyarakat daripada kepen-

tingan pemerintah atau kepentingan pribadi. Anggota DPR-RI Komisi IV telah menunjukkan peran sebagai pembawa aspirasi rakyat.

Hidup bagaikan sandiwara (Burke dalam Griffin 2006). Menurut Herbert Mead setiap orang memiliki peran dimana peran tersebut menuntut orang yang bersangkutan untuk berperilaku sesuai harapan orang lain. Peran yang dimaksud bagaimana harus berbicara sebagaimana yang dipahami dan diharapkan orang lain, (Littlejohn & Foss 2008); (Griffin 2006) (Stacks et.al 1991).

Masyarakat menuntut kita menjalankan peran sebagaimana yang telah dirumuskan oleh budaya tertentu. Sebagaimana dikatakan oleh Matthew Arnold (dalam Brooker 1998) kita dituntut untuk berperilaku sebagaimana orang lain inginkan, yang dijelaskan dengan istilah 'Doing as one Likes'. Bila tidak, orang tersebut dipandang telah melakukan pelanggaran atas peran yang diharapkan. Pada umumnya orang tidak suka melanggar atau keluar dari peran yang telah digariskan oleh masyarakat. Bila tetap melakukan akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat yang membuatnya jadi malu atau terkucil.

Dalam menghindari diri jadi malu dan terkucil, dalam diri seseorang akan muncul tanggungjawab. Bertanggungjawab untuk menjalankan peran sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam kaitan dengan muatan kepentingan pesan komunikasi anggota DPR-RI Komisi IV yang lebih dominan membawa kepentingan masyarakat merupakan tanggungjawab yang tumbuh pada mereka, Tanggungjawab tersebut sejalan dengan tuntutan peran sebagai wakil rakyat.

Selanjutnya bila dikaitkan antara karakteristik anggota dengan muatan kepentingan pesan komunikasi akan diuji menggunakan statistik korelasi *Kendall Thau*.

Ukuran kuatnya hubungan dapat dilihat dari koefisien ( r ) yang dihasilkan



oleh perhitungan statistik. Besar koefisien ( $r$ ) dan kuatnya hubungan secara kasar digambarkan oleh Guilford (*dalam* Rakhmat 1984) dapat dilihat di tabel 11.

Muatan kepentingan berhubungan lemah ( $r=0,116$ ) dengan jenis pekerjaan. Artinya pekerjaan yang berbeda akan diikuti oleh perbedaan muatan kepentingan yang disampaikan. Muatan pesan dari pengusaha cenderung mengandung kepentingan masyarakat. Anggota DPR-RI Komisi IV yang pekerjaan sebelumnya sebagai pengusaha lebih perhatian kepada kepentingan masyarakat daripada latar belakang pekerjaan lainnya. Anggapan yang

sebelumnya bahwa motivasi pengusaha menjadi anggota DPR untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tidak beralasan.

Tabel 11  
Besar koefisien dan kuatnya hubungan

| Koefisien hubungan | Kuatnya hubungan    |
|--------------------|---------------------|
| 0,90 – 1,00        | Sangat kuat         |
| 0,70 – 0,90        | Kuat                |
| 0,40 – 0,70        | Cukup berarti       |
| 0,20 – 0,40        | Rendah tetapi pasti |
| 0,00 – 0,20        | Lemah               |

Berikut ini hasil uji korelasi antara karakteristik Anggota DPR RI Komisi IV dengan muatan kepentingan:

Tabel 12  
Korelasi antara Karakteristik Anggota DPR-RI Komisi IV dengan Muatan Kepentingan

| n=633.<br>Muatan kepentingan | Jenis kelamin | Umur  | Pendidikan | Fraksi | Masa bakti | Pekerjaan   |
|------------------------------|---------------|-------|------------|--------|------------|-------------|
| $r$                          | .028          | -.022 | .034       | -.040  | .006       | <b>.116</b> |

## Argumentasi

Argumentasi pesan dibagi menjadi dua, yaitu jenis alasan dan bentuk bukti yang disertakan dalam pesan komunikasi.

### 1. Jenis Alasan

Tabel 13

Jenis Alasan yang digunakan oleh Anggota DPR-RI Komisi IV dalam pesan komunikasi ketika RDP dengan Kementerian Pertanian tahun 2010

N= 633

| No.    | Jenis alasan          | F   | %     |
|--------|-----------------------|-----|-------|
| 1      | Sebab akibat          | 37  | 5.8   |
| 2      | Gejala                | 394 | 62.2  |
| 3      | Kriteria              | 64  | 10.1  |
| 4      | Perbandingan          | 30  | 4.7   |
| 5      | Logika                | 62  | 9.8   |
| 6      | Tidak ada argumentasi | 46  | 7.3   |
| Jumlah |                       | 633 | 100.0 |

Dari tabel di atas dapat diketahui, jenis alasan yang paling banyak (62,2%) digu-

nakan Anggota Komisi IV dalam mendukung pendapatnya adalah gejala Jenis alasan berikutnya kedua terbanyak adalah kriteria 10,1%, ketiga terbanyak adalah logika 9,8%, keempat terbanyak adalah tanpa alasan 7,3 %, kelima terbanyak adalah sebab akibat 5,8%, dan yang paling sedikit digunakan adalah jenis alasan perbandingan 4,7%.

Jenis alasan gejala paling banyak (62,2%) disebabkan oleh fakta-fakta yang ditemukan di lapangan sewaktu mengadakan kunjungan kerja atau reses. Jenis alasan ini menunjukkan data-data empiris yang sangat kuat dan sulit untuk dibantah. Jenis alasan gejala adalah sesuatu yang faktual dan cukup kuat untuk mendukung suatu pendapat.

Dalam RDP Anggota Komisi IV DPR sedikit menggunakan jenis alasan logika, sebab-akibat dan perbandingan. Karena bentuk ketiga argumentasi seperti ini sering tidak didukung data yang memadai. Jenis bukti logika, sebab-akibat dan per-

bandingan lebih tepat digunakan dalam persidangan ilmiah. Ketiga jenis bukti ini juga mudah dijawab dengan logika, sebab akibat dan perbandingan pula.

Pemilihan jenis alasan yang dilakukan oleh Anggota DPR-RI Komisi IV juga merupakan bukti bahwa mereka telah bekerja dengan baik. Mereka turun ke ma-

syarakat berdialog dengan masyarakat mendapat fakta-fakta yang dapat dijadikan bahan dalam RDP dengan Kementerian Pertanian.

Bila jenis alasan dikaitkan dengan karakteristik Anggota DPR dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 14  
Korelasi antara Karakteristik Anggota DPR Komisi IV dengan Jenis alasan  
N=633

| Jenis alasan | Jenis kelamin | Umu r | Pendidikan | Fraksi        | Masa bakti | Pekerjaan     |
|--------------|---------------|-------|------------|---------------|------------|---------------|
| r            | -.042         | .056  | .051       | <b>.113**</b> | -.052      | <b>-.078*</b> |

Jenis alasan berhubungan negatif lemah ( $r = -0,113$ ) dengan fraksi dengan pekerjaan. Artinya bila anggota dari fraksi pro pemerintah maka pesan yang disampaikan cenderung tanpa alasan. Jenis alasan berhubungan negatif lemah ( $r = -0,078$ ) dengan jenis pekerjaan. Artinya pekerjaan sebagai pengusaha pesan yang disampaikan cenderung tanpa alasan.

Jenis alasan yang digunakan oleh Anggota DPR-RI Komisi IV yang pro pemerintah cenderung tanpa alasan. Hal ini dapat dipahami, pendapat yang disampaikan tidak memerlukan alasan yang kuat karena anggota tersebut merupakan bagian dari pemerintah. Pesan tanpa alasan layaknya saran dari seorang sahabat.

## 2. Bentuk Bukti

Dari tabel 15 di bawah dapat diketahui, bukti yang digunakan oleh Anggota Komisi IV dalam menyampaikan pendapat dalam rapat paling banyak adalah naratif (45,5%), Kedua terbanyak adalah bentuk bukti rasionalisasi 21,5%, ketiga terbanyak adalah jenis bukti pengalaman langsung 17,1%, keempat terbanyak adalah tidak ada bukti 7,3%, kelima adalah testimony 6,8%, keenam adalah Anekdote 1,9%, dan yang paing sedikit digunakan adalah jenis bukti demonstrasi 0,2%.

Tabel 15  
Bentuk bukti yang digunakan oleh Anggota DPR-RI Komisi IV dalam pesan komunikasi ketika RDP dengan Kementerian Pertanian Tahun 2010. N= 633

| No.    | Bentuk bukti         | F   | %     |
|--------|----------------------|-----|-------|
| 1      | Naratif              | 288 | 45.5  |
| 2      | Rasionalisasi        | 136 | 21.5  |
| 3      | Pengalaman langsung  | 108 | 17.1  |
| 4      | Tidak ada pembuktian | 45  | 7.1   |
| 5      | Testimoni            | 43  | 6.8   |
| 6      | Anekdote             | 12  | 1.9   |
| 7      | Demonstrasi          | 1   | 0.2   |
| Jumlah |                      | 633 | 100.0 |

Bentuk bukti naratif merupakan penggambaran secara rinci suatu persoalan menjadi sulit penting. Bentuk ini paling banyak dipakai karena anggota DPR-RI adalah orang-orang yang pandai berkomunikasi. Dari fakta yang kecil dapat didramatisasi menjadi sesuatu yang sangat besar dan penting.

Bila Bentuk bukti dikaitkan dengan Karakteristik Anggota DPR Komisi IV dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 16  
Korelasi antara Karakteristik Anggota DPR Komisi IV  
dengan Bentuk bukti

N=633

| Bentuk bukti | Jenis kelamin  | Umur | Pendidikan | Fraksi | Masa bakti | Pekerjaan |
|--------------|----------------|------|------------|--------|------------|-----------|
| r            | <b>-.149**</b> | .012 | -.045      | .001   | .033       | .021      |

Jenis kelamin berhubungan negatif lemah ( $r = -0,149$ ) dengan bentuk bukti. Jenis kelamin yang berbeda berhubungan dengan bentuk bukti yang disampaikan. Artinya laki-laki cenderung memilih pesan tanpa bukti.

Antara perempuan dan laki-laki terdapat indikasi berbeda dalam menyajikan bukti. Hal ini sejalan dengan perbedaan sifat psikologis dan biologis antara perempuan dan laki-laki. Perempuan lebih mengedepankan perasaan sedangkan laki-laki lebih mengedepankan rasionalitas (Kotler & Armstrong 1991; Schroder 2008).

Faktor lain yang membuat terjadinya perbedaan antara perempuan dan laki-laki adalah sifat komunikasi masing-masing gender. Sebagaimana dikemukakan oleh Tannen (*dalam* Griffin 2006) dan Maria Stubbe (*dalam* Krokke & Sorensen 2006) perempuan dalam berkomunikasi bernuansa untuk membina hubungan sedangkan laki-laki berkomunikasi bernuansa untuk menunjukkan status. Perempuan dalam komunikasi formal akan sedikit berbicara, tetapi cenderung menggunakan bukti. Laki-laki berkomunikasi lebih sering namun ada kecenderungan komunikasi yang dilakukan hanya sekedar untuk menunjukkan eksistensi diri dan status. Karena itu kadang laki-laki tidak menyertakan bukti dalam komunikasinya.

### Kesimpulan

1. Agenda komunikasi Anggota DPR-RI Komisi IV dengan Kementerian Pertanian tahun 2010 lebih dominan pada kebijakan daripada yang berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat.

2. Jenis agenda rapat yang paling menarik perhatian anggota DPR-RI Komisi IV untuk berbicara adalah Realisasi Anggaran 2009 dan Rencana Anggaran 2010.

3. Setiap Anggota DPR-RI Komisi IV berbicara dalam RDP membutuhkan waktu minimal 5 menit.

4. Muatan kepentingan yang paling banyak diperjuangkan oleh Anggota DPR-RI Komisi IV adalah kepentingan rakyat. Memperjuangkan kepentingan rakyat lebih cenderung datang dari anggota yang berlatar-belakang pekerjaan pengusaha.

5. Jenis alasan yang paling banyak digunakan oleh Anggota DPR-RI Komisi IV dalam RDP dengan Kementerian Pertanian tahun 2010 adalah gejala faktual yang diperoleh dari hasil kunjungan kerja atau reses.

6. Bentuk bukti yang paling banyak digunakan oleh Anggota DPR-RI Komisi IV dalam RDP dengan Kementerian Pertanian tahun 2010 adalah gejala dramatisasi bentuk naratif yang sudah menjadi merupakan keahlian membuat fakta kecil menjadi besar dan penting.

### Daftar Pustaka

Anderson, Carolyn M. and Martin, Matthew M. (1995) The Effects of Communication Motives, Interaction Involvement, and Loneliness on Satisfaction : A Model of Small Groups, *Small Group Research* 1995 26: 118, Jurnal [sagepub.online](http://sgr.sagepub.com/)

- content/26/1/118, diunduh 24 Oktober 2010.
- Bandura, Albert (1997) *Social Learning Theory*, <http://www.learning-theories.com/social-learning-theory-bandura>, diunduh 6 April 2012 pukul 6.55 WIB
- Barge, J. Kevin (2009) *Small group, Workgroup, and Teams dalam 21<sup>st</sup> Communication of Reference Handbook Vol 1 & 2*, Eadie, William F. (ed), Sage Publication, California.
- Barton, Heather and Bucy, Erik P. (2008) *The Representation of Women in Publication: A Content Analysis of the Journals Political Communication and Press/Politics*, Presented at the Midwest Political Science Association Panel on Women, Gender, and the Media, [http://convention3.allacademic.com/one/prol/prol01/index.php?click\\_key=4](http://convention3.allacademic.com/one/prol/prol01/index.php?click_key=4) diunduh 1 Desember 2011 pukul 20.00 WIB.
- Beck, Dieter and Fisch, Rudolf (2000) *Argumentation and Emotional Processes in Group Decision-Making: Illustration of a Multilevel Interaction Process Analysis Approach*, *Group Processes Intergroup Relations* 2000 3: 183, DOI: 10.1177/1368430200003002005, *Jurnal Sagepub online* <http://gpi.sagepub.com/content/3/2/183> diunduh 24 Oktober 2010.
- Berger, Arthur Asa (2000) *Media Analysis Techniques*, Second Edition, alihbahasa Setio Budi HH, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Berger, Charles R.; Roloff, Michael E, and Roskos-Ewoldsen, David R. (Editors), (2010) *Handbook of Communication Science, Second edition*, Sage Publication. California.
- Berlo, David K. (1960) *The Process of Communication an Introduction to Theory and Practice*, Holt, Rinehart and Winston, Inc, New York.
- Biro Pusat Statistik, (2009) *Data Tenaga Kerja Indonesia 2009*. <http://www.bps.or.id>.
- Brookers, Wills (1998) *Cultural Studies*, Hodder Headline Plc., London.
- Burgoon, Michael, (1974) *Approaching Speech Communication*, Holt Rinehart and Winston, New York.
- Burstein, Bonnie and Goodman, Gerald, (1988) *Analyzing Communication Acts in Small Groups With the Response Mode Model : A Training Guide*, *Small Group Research* 1988 19: 495, DOI: 10.1177/104649648801900406, *Jurnal sagepub.online* <http://sgr.sagepub.com/content/19/4/495>. diunduh 24 Oktober 2010.
- Diekman, Amanda B. and Schneider, Monica C., (2010) *A Social Role Theory Perspective on Gender Gaps in Political Attitudes*, *Psychology of Women Quarterly* 2010 34: 486. DOI: 10.1111/j.1471-6402.2010.01598.x (diunduh 28 November 2011 pukul 14.00)
- DPR-RI, Komisi IV DPR-RI, <http://www.dpr.go.id/id/Komisi/Komisi-IV>
- DPR-RI, *Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2010 – 2014*, <http://www.dpr.go.id>

- Emmert, Philip & Barker, Larry L., (1989) *Measurement of Communication Behavior*, Longman, New York.
- Emrus, 2009, *Subjektivitas Aktor Politik Mengkonstruksi Makna pada Perilaku Komunikasi Politik Anggota DPR*. Suara Pembaruan Daily, 17 November 2009, diunduh 2 Agustus 2010. (Disertasi komunikasi)
- Fetzer, Anita (2008) "And I Think That Is a Very Straightforward Way of Dealing With It" *The Communicative Function of Cognitive Verbs in Political Discourse*, *Journal of Language and Social Psychology* Volume 27 Number 4 December 2008 384-396, Sage Publications, 10.1177/0261927X08322481, <http://jls.sagepub.com> hosted at, <http://online.sagepub.com>, diunduh 10 Januari 2011.
- Fiedler, Klaus, (2007) *Social Communication*, Klaus Fiedler (editor) Psychology Press, New York.
- Knapp, Mark L., & Miller, Gerald R. (1994) *Handbook of Interpersonal Communication*, Second edition, Sage Publications, London.
- Goldberg, Alvin A. & Larson, Carl E., (1985) *Komunikasi Kelompok, Proses-proses diskusi dan penerapannya*, alihbahasa Koesdarini Sumuati dan Gary R. Jusuf, UI-Press, Jakarta.
- Griffin, EM. (2006) *A First Look At Communication Theory*. Sixth edition. America, New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Jauhari, Asep (2004) *Peranan Komunikasi Politik Dalam Proses Legislasi (Kasus pada pembahasan UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Tanaman di Komisi III DPR-RI)*, Tesis, Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan, IPB, Bogor.
- Kippendorf, Klaus, (1993) *Analisis Isi: Pengantar ke Metodologi*, Alihbahasa Farid Waliji, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kompas, (2010) *Wajah DPR dan DPD 2009 – 2014, Latarbelakang pendidikan dan karier*, Kompas, Jakarta.
- Kotler, Philip & Armstrong, Gary, (1991) *Principle of Marketing*, Fifth edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Krolokke, Charlote and Sorensen, Anne Scott (2006) *Gender Communication Theoris and Analyses From Science To Performance*, Sage Publications, London.
- Larson, Charles U., (2004) *Persuasion: Reception and Responsibility*, Tenth edition, Thomson Warsworth, Belmont, California.
- Ledwith, Margareth, (2007) *Community Development: A Critical Approach*, The Policy Press University of Bristol. UK.
- Littlejohn, Stephen W. & Foss, Karen A., (2008) *Theories of Human Communication*, Ninth Edition, Thomson Wadsworth, Belmont.
- Mulyana, Deddy (2007) *Komunikasi Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Newman, Bruce I., (1999) *Handbook of Political Marketing*, Sage Publication, London.

- Newsom, Doug & Carrell, Bob (2001) *Public Relations Writing: Form and Style*, Sixth edition, Wadsworth Thomson Learning, Belmont, California. UI=f403d723d4c966  
c7515642306032cb7f diunduh 15 Mei 2010 (Disertasi Komunikasi)
- Petty, Richard E. & Cacioppo, John T., (1981) *Attitudes and Persuasion: Classic and Contemporary Approach*, Wm.C. Brown Company Publishers, Dubuque, Iowa.
- Rakhmat, Jalaluddin, (2001) *Psikologi Komunikasi* (edisi revisi), Remadja Roskakarya, Bandung.
- , (1984) *Metode Penelitian Komunikasi*, Remadja Karya, Bandung.
- Reardon, Kathleen K., (1987) *Interpersonal Communication Where Minds Meet*, Wadsworth Publishing Company, Belmont California, 1987.
- Robbins, Stephen P. & Coulter, Mery, *Manajemen, Pearson International*, Printice Hall, New Jersey, 2007.
- Ruben, Brent D., (1992) *Communication and Human Behavior*, Third edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Ruben, Rebecca B.; Palmgreen, Philip; Sypher, Howard E., (2004) *Communication Research Measures A Sourcebook*, Lawrence Erlbaum Associates, Publisher, New Jersey.
- Rusfian, Effy Zalfiana, (2010) *Pengaruh Variabel Variabel Sosial Budaya Variabel Kepribadian dan Variabel Situasional Terhadap Perilaku Komunikasi Anggota DPR-RI dalam Situasi Konflik*,  
[http://webdev.ui.ac.id/post/promosi-doktor-effy-zalfiana-rusfian-id.html?](http://webdev.ui.ac.id/post/promosi-doktor-effy-zalfiana-rusfian-id.html)
- Schroder, Peter, (2008) *Strategi Politik Edisi Revisi untuk pemilu 2009*, alih bahasa: Danise Joyce Matindas dan Irina Dayasih, Friedrich-Nauman-Stiftung fur Die Freiheit, Jakarta.
- Severin, Werner J. & Tankard, James W., (2005) *Teori Komunikasi Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa*, Alihbahasa: Sugeng Hariyanto, Prenada Media, Jakarta
- Soetjipto, Ani W., (2000) *Hak-Hak Politik Wanita Indonesia: Refleksi dan Perjuangan di Era Reformasi*, dalam Tapi Omas Ihromi, dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni Bandung.
- Stacks, Don; Hickson III, Mark & Hill Jr, Sidney, (1999) *Introduction to Communication Theory*, Holt, Rinehart and Winston, Inc. Chicago.
- Stempel III, Guido H.; Weaver, David H; Wilhoit, G. Cleveland (Editor) (2003) *Mass Communication Research and Theory*, Pearson Education, New York.
- Suara Pembaruan, 29 Juli 2010 hal 1, *Kinerja DPR: Banyak Reses, Hasil Nihil*, diunduh 29 Juli 2010.
- Tan, Alexis S. (1981) *Mass Communication Theories and Research*, Grid Publishing Inc., Ohio, Columbus.
- Wimmer, Roger D. and Dominick, Joseph R., (2000) *Mass Media Research An Introduction*, Wadsworth Publishing Company, Belmont C.A.